

ABSTRAK

Hengky Tejawijaya (01656190017)

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA NOTARIIL PERJANJIAN KERJASAMA OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1751 K/PDT/2018)

(xii + 115 halaman; 2 lampiran)

Notaris adalah salah satu profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian. Salah satu akta yang dapat dibuat oleh notaris adalah Akta Perjanjian Kerjasama. Dalam perkara ini akan membahas Akta Perjanjian Kerjasama yang dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah yuridis normatif, dengan data utama yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Selanjutnya permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum pembatalan akta perjanjian kerjasama dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1751 K/Pdt/2018 dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan. Akta Perjanjian Kerjasama yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan dapat berakibat hukum yaitu aktanya dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk apapun juga. Selain itu secara administratif pembukuan Notaris dan nomor Akta yang dibatalkan tersebut harus dilakukan pencoretan nomor aktanya baik pada minuta akta maupun pada buku daftar akta Notaris. Dalam perkara ini Notaris H. Yunardi, S.H. tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya baik secara administratif, perdata, pidana maupun atas pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran peraturan jabatan Notaris karena akta perjanjian kerjasama no. 62/2006 yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan murni berdasarkan kewenangan hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara. Notaris yang bersangkutan sudah membuat akta perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Referensi: 59 (1982-2017)

Kata kunci: Pembatalan Akta, Akta Perjanjian Kerjasama, Notaris

ABSTRACT

Hengky Tejawijaya (01656190017)

LEGAL CONSEQUENCES DUE TO THE CANCELLATION OF COOPERATION AGREEMENT DEED BY SUPREME COURT (VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF INDONESIA REPUBLIC NUMBER 1751 K/PDT/2018)

(xii + 115 pages; 2 attachments)

Public Notary is one of the professions that possesses the authority to make deeds. One of the deed made by Public Notary is the Cooperation Agreement Deed. In this case, writer will discuss further about the Cooperation Agreement Deed stated null and void by Supreme Court of Indonesian Republic. The research method used by the writer is normative juridical, with the main data, namely secondary data obtained from library references. Furthermore, the problem highlighted in this thesis are the legal consequences of the cooperation Agreement Deed stated null and void by Supreme Court verdict number 1751 K/PDT/2018 and the accountability of the Public Notary whose deed has been nulled and voided by the Supreme court, so that the Cooperation Agreement Deed issue that is nulled and voided by the Supreme Court may have legal consequences, namely the deed is deemed never to exist and does not have legal force in any form. Moreover, administratively, Public Notary administration and Cooperation Agrrement Deed number that have been nulled and voided must be abolished. The deed number abolition must be applied on both minuta deed and on the Public Notary deed register book. In this case, Notary H. Yunardi, S.H. cannot be held accountable either administratively, civilly, criminally or for violations of the Notary Code of Ethics or violations of the notary position regulations because of the cooperation agreement deed no. 62/2006 which was declared null and void by the court purely based on the judge's authority to make decisions in a case. The notary concerned has made the cooperation agreement deed in accordance with applicable law in Indonesia.

References: 59 (1982-2017)

Keywords: Null and Void of Deed, Cooperation Agreement Deed , Public Notary